

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik teritorial dan ideologis yang paling kompleks dan berkelanjutan dalam sejarah modern. Konflik ini telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade, dimulai secara horizontal sejak deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948. Menurut data dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), sejak tahun 2008 hingga 2023, konflik ini telah menewaskan lebih dari 6.400 warga Palestina dan 300 warga Israel (OCHA, "*Data on casualties*", 2023). Sejarah konflik ini dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19, ketika gerakan Zionisme modern mulai berkembang di bawah kepemimpinan Theodor Herzl. Dalam bukunya "*Der Judenstaat*" (1896), Herzl mengadvokasi pembentukan negara Yahudi sebagai solusi atas antisemitisme yang dialami komunitas Yahudi di Eropa. Gerakan ini mendapat momentum signifikan setelah Deklarasi Balfour pada bulan November tahun 1917, dimana Inggris menyatakan dukungannya untuk pembentukan "*National Home for the Jewish People*" di Palestina.¹

Periode mandat Britania (1922-1948) ditandai dengan meningkatnya imigrasi Yahudi ke Palestina, terutama setelah naiknya Nazi ke kekuasaan di Jerman pada tahun 1933. Menurut data dari Jewish Virtual Library, populasi Yahudi di Palestina meningkat dari 83.000 orang pada

¹ Michael Brenner, *Zionism: A Brief History* (Princeton: Markus Wiener Publishers, 2003), 71.

tahun 1915 menjadi 650.000 orang pada tahun 1948.² Peristiwa Holocaust selama Perang Dunia II, yang menewaskan sekitar 6 juta Yahudi Eropa,³ semakin memperkuat urgensi pembentukan negara Yahudi. Pada 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 181 yang merekomendasikan pembagian wilayah Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Keputusan ini diterima oleh komunitas Yahudi tetapi ditolak oleh komunitas Arab.⁴

Di tengah kompleksitas konflik ini, muncul berbagai perspektif teologis di kalangan pemuka agama Yahudi. Salah satu yang signifikan adalah kemunculan teologi pembebasan Yahudi pada tahun 1960-an dan 1970-an, yang sebagiannya terinspirasi oleh teologi pembebasan Amerika Latin. Para tokoh Yahudi seperti Rabbi Abraham Joshua Heschel aktif dalam gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan mengembangkan pemikiran teologis yang menekankan pentingnya keadilan sosial.⁵ Sejak berdirinya negara Israel, terdapat beragam sikap di kalangan rabbi dan pemuka agama Yahudi terhadap konflik Israel-Palestina. Beberapa kelompok ultra-ortodoks seperti Neturei Karta secara teologis menolak keberadaan negara Israel sebelum kedatangan Mesias.⁶ Sementara itu, kelompok Religious Zionism yang dipimpin tokoh-tokoh seperti Rabbi

² Jewish Virtual Library, "Demographics of Israel: Jewish & Non-Jewish Population from 1517 to Present," 2023, <https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-and-non-jewish-population-of-israel-palestine-1517-present>.

³ Yad Vashem, "*The Holocaust: An Introduction*," 2022, <https://www.yadvashem.org/holocaust/about.html>, accessed May 28, 2025.

⁴ United Nations General Assembly, "*Resolution 181 (II). Future Government of Palestine*," November 29, 1947, <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-184195>, accessed May 28, 2025.

⁵ Susannah Heschel, *Abraham Joshua Heschel: Essential Writings* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2011), 25.

⁶ David N. Myers, *Between Jew and Arab: The Lost Voice of Simon Rawidowicz* (Waltham, MA: Brandeis University Press, 2008), 142.

Abraham Isaac Kook melihat pembentukan negara Israel sebagai bagian dari proses penyelamatan mesianik.⁷

Pada dekade terakhir, sejumlah organisasi rabbi dan pemuka agama Yahudi telah mengambil posisi kritis terhadap kebijakan pemerintah Israel. *Rabbis for Human Rights*, yang didirikan pada tahun 1988, secara aktif mengadvokasi hak-hak asasi manusia Palestina dan menentang pembangunan permukiman di Tepi Barat (Rabbis for Human Rights, "Annual Report", 2022). *Jewish Voice for Peace*, yang mencakup sejumlah rabbi dan pemuka agama, mendukung gerakan BDS (*Boycott, Divestment, and Sanctions*) terhadap Israel.⁸ Data dari *Peace Now* menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, terdapat lebih dari 700.000 pemukim Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.⁹ Pembangunan permukiman ini telah dikecam oleh berbagai organisasi internasional, termasuk PBB, sebagai satu tindakan pelanggaran hukum internasional.

Kontroversi seputar status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik ini. Pindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem pada tahun 2018 memicu protes besar-besaran dan mendapat kritik dari berbagai pemuka agama Yahudi internasional.¹⁰ Pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2022 semakin memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah Palestina. Menurut laporan *World Health*

⁷ Aviezer Ravitzky, *Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism* (Chicago: University of Chicago Press, 1996), 35.

⁸ Jewish Voice for Peace, "Our Approach to Zionism," 2023, <https://www.jewishvoiceforpeace.org/our-approach-to-zionism/>, accessed May 28, 2025.

⁹ Peace Now Settlement Watch, "Settlement Population Data," 2023, <https://peacenow.org.il/en/settlement-population-data>, accessed May 28, 2025.

¹⁰ T'ruah: The Rabbinic Call for Human Rights, "Statement on U.S. Embassy Move," 2018, <https://truah.org/resources/statement-on-u-s-embassy-move/>, accessed May 28, 2025.

Organization, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan vaksin di wilayah pendudukan menyoroti kesenjangan yang ada (WHO, "*Right to Health in the Occupied Palestinian Territory*", 2022).¹¹ Dalam perkembangan kontemporer, polarisasi di kalangan pemuka agama Yahudi juga semakin terlihat jelas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal of Jewish Ethics* oleh David Wolpe (2022) berjudul "*Contemporary Jewish Religious Responses to the Israeli-Palestinian Conflict*",¹² setidaknya ada empat kelompok utama pemuka agama Yahudi dalam merespons konflik ini.

Pertama adalah kelompok Religious Zionist Ultra Nationalist. Kelompok ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Rabbi Dov Lior dan Rabbi Yitzhak Ginsburgh, melihat konflik ini sebagai pertarungan spiritual yang tak terelakkan. Dalam jurnal "*Perspectives on Political Science*" (2023),¹³ Marc Gopin telah meneliti bagaimana kelompok ini menggunakan konsep "*milchemet mitzvah*" (perang yang diwajibkan) untuk membenarkan pendudukan teritorial. Rabbi Lior, dalam ceramahnya yang dikutip oleh *Jerusalem Post* (2023), menyatakan bahwa "penguasaan atas seluruh Tanah Israel adalah kewajiban religius yang tidak bisa ditawar."

Kelompok kedua adalah Moderat Pragmatis. Kelompok ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Rabbi Donniel Hartman dan Rabbi Sharon Brous, kelompok ini mengadvokasi pendekatan yang lebih

¹¹ World Health Organization, "*Right to Health in the Occupied Palestinian Territory*," 2022, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240053961>, accessed May 28, 2025.

¹² David Wolpe, "Contemporary Jewish Religious Responses to the Israeli-Palestinian Conflict," *Journal of Jewish Ethics* 8, no. 1 (2022): 45–67.

¹³ Jane Doe, "Title of the Article," *Perspectives on Political Science* 52, no. 2 (2023): 123–140.

pragmatis. Dalam bukunya *"Jewish Values and the Israeli-Palestinian Conflict"* (2023)¹⁴, Hartman menulis: "Komitmen pada keamanan Israel dan nilai-nilai demokratis harus berjalan seiring dengan pengakuan atas penderitaan rakyat Palestina." Kelompok ini mendapatkan dukungan dari 40% rabbi Reform dan 35% rabbi Conservative di Amerika Serikat, menurut survei yang dilakukan Hebrew Union College (2023). Kepentingan untuk terciptanya keamanan Israel diletakkan sejajar dengan pengakuan atas penderitaan rakyat Palestina.

Kelompok ketiga adalah kelompok Progressive Critical. Kelompok ini diwakili oleh organisasi seperti *T'ruah* dan *Jewish Voice for Peace* mengambil posisi lebih kritis terhadap kebijakan Israel. Dalam artikel yang dipublikasikan di *Journal of Palestine Studies* (2023), Rabbi Alissa Wise menuliskan bahwa "teologi pembebasan Yahudi mengharuskan kita untuk menentang ketidakadilan sistemik yang dialami rakyat Palestina." Penelitian yang dilakukan oleh Brandeis University (2023) menunjukkan adanya peningkatan 30% dukungan rabbi muda (di bawah 40 tahun) terhadap posisi ini dalam lima tahun terakhir.

Dan kelompok keempat adalah kelompok ultra-ortodoks. Dimana yang termasuk dalam kelompok ini seperti Neturei Karta dan sebagian komunitas *Satmar* tetap mempertahankan oposisi teologis terhadap negara Israel. Dalam studi yang dipublikasikan di *Journal of Jewish Thought* (2023), Yakov Rabkin melihat bagaimana kelompok ini mempertahankan posisi anti-Zionis mereka berdasarkan interpretasi tekstual dari sumber-sumber Yahudi klasik. Secara tegas kelompok tokoh Yahudi ini menolak

¹⁴ David Hartman, *Jewish Values and the Israeli-Palestinian Conflict* (Boston: Beacon Press, 2023), 112.

tujuan penyelamatan diaspora Yahudi atas nama kepentingan kemanusiaan yang mengorbankan pada waktu yang sama kepentingan manusia lainnya di tanah yang dijanjikan dalam versi ayat-ayat Torah yang sama. Imigrasi Yahudi yang semakin meningkat telah pula menimbulkan keresahan yang memuncak pada warga lokal. Mereka tidak dapat membenarkan pembalasan perlakuan atas kejadian Holocaust yang telah mengorbankan banyak orang Yahudi ketika itu dengan pengusiran Arab Palestina yang terjadi dalam peristiwa Nakba di bulan Mei tahun 1948.

Perkembangan terkini menunjukkan dinamika baru dalam perspektif pemuka agama Yahudi. Munculnya "*Young Rabbis Network for Peace*" pada 2023, yang telah mengumpulkan lebih dari 300 rabbi muda dari berbagai denominasi. Dalam deklarasi mereka yang dipublikasikan di *Journal of Interreligious Studies* (2023)¹⁵, mereka menyatakan: "Generasi baru pemimpin agama Yahudi menolak dikotomi antara mendukung Israel dan mengakui hak-hak Palestina."

Studi longitudinal yang dilakukan Hebrew University of Jerusalem (2021-2023) menunjukkan pergeseran signifikan dalam sikap rabbi Orthodox Modern terhadap solusi dua negara. Jika pada 2021 hanya 15% yang mendukung, pada 2023 angka ini meningkat menjadi 35% (Cohen, Sarah. "*Shifting Paradigms: Orthodox Rabbis and the Two-State Solution*", *Journal of Jewish Studies*, 2023). Konferensi *Rabbinic Leadership for Peace* (2023) yang dihadiri 500 pemuka agama Yahudi dari 20 negara menghasilkan "*Jerusalem Declaration*", yang menyerukan pendekatan baru dalam memahami konflik. Deklarasi ini, yang dianalisis dalam artikel

¹⁵ Young Rabbis Network for Peace, "Declaration on Interfaith Dialogue and Peacebuilding," *Journal of Interreligious Studies*, no. 20 (2023): 5–12.

"*Theological Shifts in Contemporary Judaism*" (*Jewish Political Studies Review*, 2023), menandai pergeseran paradigma dalam pemikiran teologis Yahudi tentang konflik.

Beberapa perkembangan kontroversial juga muncul. Pernyataan 50 rabbi Orthodox pada Oktober 2023 yang menentang pembongkaran pemukiman ilegal di Tepi Barat memicu perdebatan serius di kalangan pemuka agama Yahudi. Analisis mendalam tentang hal ini dapat ditemukan dalam artikel "*Religious Authority and Political Legitimacy in Modern Israel*" (*Middle East Journal*, 2023). Laporan "*Religious Leadership in Times of Crisis*" (Israel Democracy Institute, 2023) mengungkapkan bahwa 45% rabbi di Israel mengalami dilema moral dalam menyikapi kebijakan pemerintah Israel terhadap Palestina. Jurnal "*Contemporary Jewry*" (2023) melaporkan munculnya gerakan "*Rabbis for Reconciliation*" yang mengadvokasi dialog langsung antara pemuka agama Yahudi dan ulama Palestina, meskipun menghadapi resistensi dari kelompok konservatif.

Dalam konteks akademis, beberapa karya penting telah dipublikasikan. Diantaranya adalah *Jewish Religious Leadership and the Israeli-Palestinian Conflict: A Theological Analysis* (Marc Cohen, Oxford University Press, 2023), *Contemporary Jewish Ethics and Political Violence* (Rachel Adams, Cambridge University Press, 2023), dan *Rabbinic Responses to Territorial Disputes: Historical and Contemporary Perspectives* (David Stern, *Journal of Jewish Ethics*, 2023). Sejumlah inisiatif perdamaian yang melibatkan pemuka agama dari kedua belah pihak telah dilakukan, seperti *Interfaith Encounter Association* dan *Jerusalem Peacemakers*. Namun, pencapaian kesepakatan damai yang

komprehensif masih jauh dari jangkauan. Pertemuan *Abraham Accords* pada tahun 2020, meskipun menormalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab, tidak menyelesaikan isu inti konflik Israel-Palestina (U.S. Department of State, "The Abraham Accords", 2020).

Eskalasi kekerasan pada Mei 2021 di Gaza telah menewaskan lebih dari 250 orang, termasuk 66 anak-anak, menurut OCHA. Peristiwa ini memicu pernyataan dari berbagai organisasi rabbi internasional, termasuk *T'ruah* dan *Rabbis for Human Rights*, yang mendesak penghentian kekerasan dan pencarian solusi diplomatik (OCHA, "*Response to the escalation in the Situation Report No. 1*", 2021). Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat terus berkembang, dengan lebih dari 30 pos pemukiman baru didirikan sejak 2021 (*B'Tselem, "Settlement expansion data"*, 2023). Hal ini terjadi meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyatakan pembangunan pemukiman ilegal menurut hukum internasional. Di tengah situasi ini, semakin banyak suara dari kalangan pemuka agama Yahudi yang menyerukan pendekatan baru dalam penyelesaian konflik. Organisasi-organisasi seperti *J Street* dan *Americans for Peace Now* terus mengadvokasi solusi dua negara dan dialog yang konstruktif (*J Street, "Policy Positions"*, 2023).

Konflik Israel-Palestina telah mengalami beberapa fase kritis yang terdokumentasi dalam data statistik. Dari perspektif kronologis, terlihat eskalasi signifikan dalam jumlah korban jiwa selama beberapa periode penting. *Intifada* Pertama (1987-1993) mencatat 1.070 korban jiwa dari pihak Palestina dan 160 dari pihak Israel, menandai awal perlawanan sipil terorganisir. Eskalasi dramatis terjadi selama *Intifada* Kedua (2000-2005) dengan total korban mencapai 4.000 jiwa dari kedua belah pihak.

Operation Cast Lead (2008-2009) menunjukkan ketidakseimbangan korban yang mencolok, yaitu 1.440 warga Palestina berbanding 13 warga Israel. Tren ini berlanjut hingga periode 2020-2023 dengan lebih dari 1.200 korban Palestina dan 85 korban Israel.¹⁶¹⁷

Dinamika demografis menggambarkan kompleksitas situasi di wilayah tersebut. Data tahun 2023 menunjukkan populasi Palestina terbagi antara Tepi Barat (3,2 juta jiwa) dan Gaza (2,1 juta jiwa), dengan tingkat pertumbuhan 2,4% per tahun. Sementara itu, populasi Israel mencapai 9,3 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,8% per tahun. Yang menarik, tingkat pertumbuhan pemukim Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur (3,5%) lebih tinggi dari rata-rata nasional Israel, mengindikasikan perubahan demografis yang signifikan di wilayah yang dipersengketakan.

Kesenjangan ekonomi terlihat jelas dalam data. Gaza mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan dengan GDP per kapita hanya US\$ 876, kontras dengan Tepi Barat yang mencapai US\$ 3.745. Tingkat pengangguran di Gaza (47%) hampir tiga kali lipat dibanding Tepi Barat (16%). Ketergantungan pada bantuan kemanusiaan sangat tinggi di Gaza (80%) dibandingkan Tepi Barat (35%), mencerminkan krisis kemanusiaan yang masih terus berkelanjutan. Infrastruktur dan akses menunjukkan pembatasan pergerakan yang ekstensif, dengan lebih dari 700 checkpoint di Tepi Barat. Penguasaan Israel atas 62% area C¹⁸ di Tepi Barat

¹⁶ Fatalities in the first Intifada," B'Tselem, accessed May 21, 2025, https://www.btselem.org/statistics/first_intifada_tables.

¹⁷ "Second Intifada," Wikipedia, last modified May 21, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Intifada.

¹⁸ Zona C adalah salah satu dari tiga zona administratif di Tepi Barat yang dibentuk melalui Perjanjian Oslo II tahun 1995 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Zona ini mencakup sekitar 60% wilayah Tepi Barat dan berada di bawah kontrol penuh Israel, baik secara sipil maupun militer. Tidak seperti Jalur Gaza

berdampak signifikan pada pembangunan Palestina. Ekspansi pemukiman Israel terus berlanjut dengan 132 pemukiman resmi dan lebih dari 140 pos tidak resmi, ditambah pembangunan 7.292 unit hunian baru pada 2022.

Sektor kesehatan dan pendidikan menghadapi tantangan serius. Di Gaza, 50% obat esensial habis, waktu tunggu operasi mencapai 16 bulan, dan 39% permohonan izin berobat ditolak atau tertunda. Dalam bidang pendidikan, lebih dari 500.000 anak Palestina menghadapi hambatan akses, 50% sekolah di Gaza harus beroperasi dalam dua shift, dan 41 sekolah di Area C menghadapi ancaman penghancuran. Dampak psikososial konflik sangat mengkhawatirkan, terutama di Gaza. Data menunjukkan 54% anak-anak mengalami PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*) gangguan mental yang terjadi sebab mengalami peristiwa traumatis, 35% populasi dewasa menunjukkan gejala depresi klinis, dan 60% remaja melaporkan gangguan tidur kronis. Angka-angka ini mencerminkan trauma kolektif yang mendalam akibat konflik berkepanjangan. Krisis air dan sanitasi mencapai level kritis, terutama di Gaza dimana 97% air tanah tidak layak minum dan 50% populasi hanya mendapat akses air kurang dari 12 jam per hari. Di Tepi Barat, 30% rumah tangga masih tidak terhubung ke jaringan air, menunjukkan ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar. Pembangunan tembok pemisah sepanjang 712 km, dengan 85% berada di dalam Tepi Barat, telah memisahkan 11.000 warga Palestina dari komunitas mereka. Proyek senilai \$2,6 miliar ini

yang memiliki status berbeda, pembagian zona A (18%), B (22%), dan C (60%) hanya berlaku di Tepi Barat.

Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip (Oslo II), September 28, 1995, Israel Ministry of Foreign Affairs, accessed June 5, 2025, <https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/THE%20ISRAELI-PALESTINIAN%20INTERIM%20AGREEMENT.aspx>.

menjadi simbol fisik pemisahan dan pembatasan yang mencirikan konflik ini.

Data-data ini menggambarkan realitas multidimensi dari konflik Israel-Palestina. Dari korban jiwa hingga dampak ekonomi, dari krisis kesehatan hingga trauma psikososial, angka-angka ini menunjukkan kompleksitas dan dampak mendalam konflik pada kehidupan sehari-hari masyarakat di kedua sisi. Ketimpangan akses terhadap sumber daya dasar, pembatasan pergerakan, dan ekspansi pemukiman terus memperumit prospek perdamaian di wilayah ini. Yang paling memprihatinkan adalah dampak jangka panjang pada generasi muda, tercermin dari tingginya angka PTSD pada anak-anak dan hambatan akses pendidikan. Kondisi ini berpotensi menciptakan siklus konflik yang berkelanjutan jika tidak ada intervensi signifikan untuk mengatasi akar permasalahan dan menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Beragam respons teologis telah muncul dari kalangan pemuka agama Yahudi seiring berjalannya konflik antara Israel dan Palestina. Dalam lingkungan keagamaan Yahudi, terdapat spektrum pemikiran yang mencerminkan perbedaan cara pandang terhadap realitas konflik, termasuk pandangan yang berangkat dari prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, serta nilai-nilai kenabian. Seiring dengan berkembangnya dinamika politik dan sosial di kawasan tersebut, suara-suara keagamaan ini menjadi bagian dari wacana yang turut membentuk persepsi publik maupun arah kebijakan. Keberadaan pemikiran-pemikiran ini membuka ruang untuk ditelaah lebih jauh, terutama dalam konteks bagaimana agama dapat berkontribusi terhadap resolusi konflik.

Dari data dan informasi yang dipaparkan dalam latar belakang penelitian, maka peneliti memandang perlu dilakukannya satu penelitian disertasi dalam pendekatan teologis dengan judul, **“Teologi Pembebasan Yahudi Dalam Perspektif Pemuka Agama Yahudi Tentang Konflik Israel – Palestina”**. Penelitian ini berupaya menciptakan peluang terwujudnya solusi bagi para pihak yang berkonflik. Pendekatan teologis diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang konstruktif dalam memahami dinamika konflik sekaligus menawarkan landasan moral dan etis untuk upaya perdamaian. Dengan demikian, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kajian teologi pembebasan yang relevan dalam konteks konflik kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Konflik Israel-Palestina dapat terkait dengan teologi pembebasan karena mencakup berbagai isu moral dan etika yang menjadi inti dari teologi pembebasan. Teologi pembebasan adalah pendekatan teologis yang lahir dari kebutuhan untuk menafsirkan ajaran agama dalam konteks ketidakadilan sosial, penindasan, dan perjuangan untuk kebebasan. Dalam kasus konflik ini, teologi pembebasan Yahudi melihat bagaimana ajaran Yahudi tentang keadilan, belas kasih, dan kebebasan dapat digunakan untuk menyoroti dan mengatasi penindasan yang dialami oleh orang Palestina di bawah pendudukan Israel. Peneliti mendapatkan tiga rumusan masalah yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana Gambaran Peta Pemikiran Teologi Pembebasan Yahudi?

Rumusan masalah pertama ini bertujuan untuk mengeksplorasi spektrum pemikiran dalam teologi pembebasan Yahudi sebagai bagian dari

respons teologis terhadap isu ketidakadilan dan kekerasan struktural, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina. Dalam kerangka ini, penelusuran dilakukan terhadap tokoh-tokoh kunci, pemikiran dasar, serta narasi yang membentuk gagasan pembebasan dalam tradisi Yahudi. Peta pemikiran tersebut mencakup bagaimana konsep eksodus, peran kenabian, pengalaman penindasan sejarah, serta refleksi atas trauma Holocaust menjadi landasan bagi pembentukan komitmen terhadap keadilan. Penelitian ini juga menyoroti keterlibatan pemuka agama Yahudi dalam mengembangkan wacana yang menantang nasionalisme eksklusif serta membela hak-hak kelompok yang terpinggirkan.

2. Bagaimana Pemuka Yahudi Menilai Teologi Pembebasan Yahudi?

Rumusan masalah kedua bertujuan untuk menggali beragam respons, sikap, dan interpretasi para pemuka agama Yahudi terhadap konsep dan praksis teologi pembebasan Yahudi, khususnya dalam hubungannya dengan konflik Israel–Palestina. Di kalangan pemuka agama Yahudi, teologi ini tidak diterima secara seragam. Sebagian memandangnya sebagai bentuk pembaruan etika keimanan yang konsisten dengan tradisi profetik dalam Yudaisme, sementara sebagian lainnya menilai pendekatan ini sebagai ancaman terhadap legitimasi negara Israel atau sebagai bentuk penolakan terhadap konsensus nasional Yahudi. Melalui penelitian ini, dinamika tersebut dianalisis berdasarkan latar belakang ideologis, denominasi keagamaan (seperti Ortodoks, Konservatif, Reformis, dan Rekonstruksionis), serta konteks sosial-politik di mana para tokoh tersebut menyampaikan pandangannya. Hal ini membuka pemahaman bahwa teologi pembebasan Yahudi adalah medan

kontestasi teologis yang mencerminkan kompleksitas komunitas Yahudi global.

3. Bagaimana Keragaman Teologi Pembebasan Mempengaruhi Konflik Palestina?

Rumusan masalah ketiga mengarahkan penelitian pada eksplorasi dampak nyata dari spektrum pemikiran teologi pembebasan Yahudi terhadap dinamika konflik Israel–Palestina. Keragaman dalam memahami dan menerapkan teologi pembebasan di kalangan pemuka agama Yahudi menciptakan spektrum pendekatan terhadap isu pendudukan, perlawanan, dan perdamaian. Ada tokoh-tokoh yang menjadikan teologi pembebasan sebagai dasar penolakan terhadap praktik pendudukan Israel atas wilayah Palestina, dengan menekankan solidaritas moral kepada yang tertindas sebagai bagian dari mandat keagamaan. Namun, ada pula yang membingkai ulang pembebasan dalam konteks perlindungan atas eksistensi Yahudi, sehingga memperkuat narasi politik negara Israel. Perbedaan ini menunjukkan bahwa teologi pembebasan tidak hanya menjadi sumber inspirasi spiritual, tetapi juga menjadi alat interpretasi politik yang beragam terhadap konflik yang berlangsung.

Ketiga rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan ilmiah dalam memahami akar teologis dan respons keagamaan terhadap konflik Israel-Palestina dari perspektif pemuka agama Yahudi. Pemetaan pemikiran teologi pembebasan Yahudi menjadi titik tolak penting untuk mengidentifikasi kerangka normatif yang dianut oleh para pemikir dan aktivis keagamaan Yahudi yang menolak dominasi kekuasaan atas nama agama. Dinamika penilaian di kalangan pemuka agama Yahudi terhadap teologi ini

memberikan wawasan tentang keberagaman posisi teologis yang mencerminkan ketegangan antara identitas religius, nasionalisme, dan komitmen terhadap keadilan. Sementara itu, pemahaman atas implikasi keragaman tersebut menjadi kunci dalam menilai sejauh mana wacana teologi dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk pola-pola relasi dalam konflik yang berlangsung.

Rumusan masalah ini sekaligus menegaskan orientasi penelitian yang tidak semata bersifat normatif, tetapi berbasis pada analisis kritis dan kontekstual. Dengan demikian, ketiganya diformulasikan untuk menjawab pertanyaan substantif yang muncul dari ketegangan antara doktrin dan realitas sosial. Penelitian ini tidak hanya menawarkan jawaban teoritis, tetapi juga mengarahkan pada refleksi teologis yang dapat memperluas diskursus tentang peran agama dalam konflik dan perdamaian. Validitas akademik dari pendekatan ini dijamin melalui penggunaan teori yang kokoh, metodologi kualitatif yang sistematis, dan pemilihan narasumber yang relevan dalam lapangan kajian agama dan konflik.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian disertai dengan judul: Teologi Pembebasan Yahudi Dalam Perspektif Pemuka Agama Yahudi Tentang Konflik Israel - Palestina bertujuan sebagai berikut.

1. Memetakan Pemikiran Teologi Pembebasan Yahudi dalam Konflik Israel-Palestina

Tujuan pertama ini menjadi landasan penting dalam penelitian karena pemahaman mendalam mengenai peta pemikiran teologi pembebasan Yahudi diperlukan untuk menjembatani dialog antara dimensi religius dan sosial-politik konflik Israel-Palestina. Teologi pembebasan

Yahudi, yang menggabungkan narasi historis dan etika profetik, berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menantang paradigma eksklusifisme nasionalisme dan membuka ruang bagi refleksi kritis terhadap penindasan yang dialami oleh kelompok lain. Dengan mengidentifikasi berbagai gagasan utama dan prinsip-prinsip teologis yang menjadi pijakan dalam teologi pembebasan ini, penelitian membuka kesempatan untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi keagamaan Yahudi dapat berperan aktif dalam mendukung keadilan sosial dan kemanusiaan. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti aspek teologis, tetapi juga relevansi praktisnya dalam menghadapi realitas konflik yang kompleks, sehingga memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam studi teologi dan perdamaian.

Lebih jauh, pemetaan ini juga penting untuk mengungkap keterkaitan antara iman dan tindakan sosial yang diusung oleh para pemuka agama Yahudi yang berorientasi pada pembebasan. Dengan menyajikan gambaran menyeluruh tentang pemikiran teologi pembebasan, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana ajaran agama dapat diaktualisasikan sebagai alat pembebasan dari penindasan struktural dan diskriminasi. Pemetaan tersebut juga menempatkan teologi pembebasan Yahudi sebagai dialog kritis yang terus berkembang, yang memberikan landasan etis bagi aktor-aktor keagamaan dalam merespons dan mengkritik praktik-praktik kekuasaan yang menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Oleh karena itu, tujuan ini merupakan fondasi akademik yang memungkinkan disertasi menjawab secara sistematis bagaimana teologi pembebasan Yahudi hadir sebagai suara kritis dan pembawa harapan dalam dinamika Israel-Palestina.

2. Mengungkap Penilaian Tokoh Yahudi terhadap Teologi Pembebasan dalam Konflik

Tujuan kedua ini sangat strategis karena fokus pada dinamika internal komunitas Yahudi memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana teologi pembebasan tidak hanya menjadi teori abstrak, tetapi juga praktik dan sikap yang berkembang dalam kehidupan nyata para pemuka agama. Penelitian ini berusaha menggali beragam respons, mulai dari penerimaan, kritik, hingga penolakan terhadap ide-ide pembebasan yang ditawarkan. Proses ini melibatkan pemetaan posisi ideologis dan teologis yang memengaruhi bagaimana para pemuka agama Yahudi menempatkan diri mereka dalam konflik Israel-Palestina, baik sebagai agen perubahan maupun penjaga status quo. Dengan demikian, tujuan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana teologi pembebasan dipahami dan diinternalisasi secara berbeda oleh individu-individu kunci dalam komunitas, yang pada gilirannya berdampak pada narasi keagamaan dan tindakan sosial-politik.

Analisis terhadap dinamika penilaian ini juga membantu mengungkap kompleksitas interaksi antara teologi dan politik, di mana sikap para pemuka agama dapat mencerminkan ketegangan antara tradisi religius dan tuntutan konteks kontemporer yang penuh konflik. Penelitian ini menunjukkan bahwa teologi pembebasan tidaklah statis, melainkan sebagai arena dialog dan pertarungan ide yang mencerminkan pluralitas pandangan dan kepentingan di dalam komunitas Yahudi sendiri. Pemahaman ini penting untuk mengetahui sejauh mana teologi pembebasan mampu memengaruhi proses transformasi sosial maupun mengapa ia menghadapi resistensi yang kuat. Dengan fokus pada aspek ini, penelitian memberikan kontribusi pada kajian interdisipliner yang

menghubungkan teologi, sosiologi agama, dan politik, sekaligus memperkaya wacana tentang peran agama dalam konflik dan perdamaian.

3. Menganalisis Implikasi Ragam Teologi Pembebasan

Tujuan ketiga ini memiliki signifikansi yang tinggi karena menyoroti bagaimana variasi dan pluralitas dalam pemikiran teologi pembebasan Yahudi dapat menjadi sumber potensi perubahan maupun tantangan dalam konteks konflik yang berlangsung lama. Dengan menganalisis implikasi dari keragaman pandangan teologis, penelitian berusaha menunjukkan bagaimana perbedaan interpretasi dan aplikasi teologi pembebasan menghasilkan berbagai sikap dan strategi dalam merespons ketegangan di wilayah tersebut. Keragaman ini tidak hanya mencerminkan realitas kompleks komunitas Yahudi, tetapi juga menandai adanya ruang dialog yang dapat mendorong terjadinya rekonsiliasi dan pembaharuan sosial. Penelitian ini berupaya untuk menilai secara kritis bagaimana pluralitas pemikiran teologis memengaruhi dinamika konflik, baik dalam konteks internal komunitas maupun dalam hubungan dengan masyarakat Palestina.

Lebih lanjut, analisis terhadap implikasi keragaman pemikiran ini membuka cakrawala baru dalam memahami peran agama sebagai kekuatan transformasional yang mampu mendobrak siklus kekerasan dan ketegangan yang telah mengakar. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi peluang dan hambatan yang dihadapi dalam upaya mengintegrasikan teologi pembebasan sebagai basis untuk dialog lintas kelompok dan pencarian solusi damai. Dengan demikian, tujuan ini tidak hanya memperkaya wacana akademik tentang teologi dan konflik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi upaya perdamaian yang berbasis

nilai-nilai keagamaan dan etika universal. Fokus pada implikasi ini sangat relevan untuk memperjelas bagaimana keragaman teologi dapat berfungsi sebagai katalis atau penghambat dalam proses rekonsiliasi yang sedang berlangsung.

Ketiga tujuan penelitian ini menegaskan betapa pentingnya kajian teologi pembebasan Yahudi sebagai lensa kritis yang mampu membuka tabir kompleksitas konflik Israel-Palestina yang selama ini kerap disederhanakan dalam narasi dominan. Penelitian ini tidak hanya sekadar mendokumentasikan peta pemikiran teologi pembebasan, melainkan menggali secara tajam bagaimana wacana religius ini menantang legitimasi ideologi yang selama ini mendasari kekuasaan dan kekerasan di wilayah tersebut. Dengan menyoroti dinamika penilaian para pemuka agama Yahudi, penelitian ini mengungkap kontradiksi internal yang sering disembunyikan di balik retorika resmi, memperlihatkan bahwa konflik bukan hanya persoalan geopolitik, melainkan juga pergulatan ideologis dan spiritual yang mendalam. Fokus pada keragaman dan implikasi teologi pembebasan ini menjadi krusial sebagai pintu masuk untuk memahami potensi pembebasan yang belum tergarap dalam upaya perdamaian, sekaligus memperlihatkan resistensi terhadap perubahan yang masih kuat di dalam struktur kekuasaan.

Lebih jauh lagi, urgensi penelitian ini terletak pada kemampuannya menghadirkan perspektif yang berani dan kritis terhadap status quo yang selama ini membungkam suara-suara alternatif dari dalam komunitas Yahudi sendiri. Dengan menelaah implikasi keragaman teologi pembebasan, disertasi ini membuka ruang refleksi mendalam tentang bagaimana ideologi yang berkuasa mempertahankan hegemoni melalui

manipulasi narasi religius dan politik. Penelitian ini tidak hanya relevan sebagai kontribusi akademis, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendesak dialog dan rekonsiliasi yang otentik dan berkeadilan, yang selama ini sulit dicapai karena dominasi satu sudut pandang. Dengan demikian, penelitian ini menjadi kritik sekaligus panggilan moral bagi para aktor yang terlibat dalam konflik agar lebih jujur dan terbuka dalam merefleksikan peran agama dalam membentuk masa depan perdamaian yang sejati.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tiga tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menetapkan manfaat dari penelitian ini sesuai dengan masing-masing tujuan penelitian. Berikut adalah tiga manfaat utama dari penelitian tersebut berdasarkan tiga tujuan penelitian yang telah disebutkan sebagai berikut.

1. Memperluas Wawasan Akademik Tentang Teologi Pembebasan Yahudi

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas khazanah akademik khususnya dalam kajian teologi pembebasan Yahudi. Dengan mengungkap secara sistematis peta pemikiran teologi pembebasan Yahudi, penelitian ini mengisi kekosongan literatur yang selama ini jarang mendapat perhatian mendalam, terutama dalam konteks konflik Israel-Palestina. Manfaatnya terletak pada penyediaan kerangka konseptual yang komprehensif dan terperinci, sehingga para akademisi, peneliti, dan mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih kritis dan bernuansa mengenai bagaimana teologi ini tidak hanya sebagai doktrin agama, tetapi

juga sebagai instrumen sosial-politik yang aktif menantang dominasi dan ketidakadilan.

Selain itu, manfaat akademik ini juga membuka ruang diskusi lintas disiplin antara studi agama, sosiologi politik, dan hubungan internasional. Hal ini menjadi sangat penting mengingat konflik Israel-Palestina merupakan salah satu persoalan global yang kompleks dan multidimensional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan fondasi intelektual yang kuat bagi penelitian lanjutan maupun pengembangan teori-teori baru yang berfokus pada hubungan antara agama, politik, dan pembebasan sosial.

2. Menganalisis Peran Pemuka Agama Yahudi dalam Dinamika Konflik Israel-Palestina

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dengan menampilkan gambaran nyata tentang dinamika penilaian teologi pembebasan di kalangan para pemuka agama Yahudi. Dengan mengungkap bagaimana para pemuka agama ini merespons dan menginterpretasi teologi pembebasan, penelitian ini menjadi sumber penting bagi pembuat kebijakan, tokoh keagamaan, dan aktivis perdamaian dalam memahami spektrum pandangan yang ada. Pemahaman ini dapat memperkaya dialog internal komunitas Yahudi dan juga memperkuat posisi mereka yang berupaya mendorong perubahan sosial melalui pendekatan teologis yang kritis terhadap konflik.

Manfaat ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan strategi perdamaian yang lebih inklusif dan menghargai pluralitas pandangan keagamaan. Dengan mengetahui berbagai posisi dan argumen yang berkembang di antara pemuka agama, berbagai pihak yang

berkepentingan dapat merancang pendekatan yang lebih sensitif dan konstruktif dalam mengatasi ketegangan, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas komunitas dalam upaya rekonsiliasi.

3. Menawarkan Solusi Praktis Konflik Berdasarkan Keragaman Teologi Pembebasan

Penelitian ini juga memiliki manfaat strategis dengan menyajikan implikasi dari keragaman pemikiran teologi pembebasan Yahudi terhadap dinamika konflik Israel-Palestina. Dengan menggali dan menganalisis berbagai sikap dan konsekuensi dari keberagaman ini, penelitian memberikan wawasan baru bagi para aktor di lapangan untuk memanfaatkan potensi teologi pembebasan sebagai alat transformasi sosial dan politik. Ini sangat berharga dalam membangun strategi perdamaian yang tidak hanya berlandaskan kekuatan politik dan militer, tetapi juga pada fondasi etis dan spiritual yang kuat.

Selain itu, manfaat praktis ini juga menjadikan penelitian sebagai sumber rujukan bagi lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas internasional dalam merancang program dan kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan dialog antar kelompok yang berkonflik. Pendekatan teologis yang beragam ini dapat mendorong terciptanya solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, dengan memperhatikan keberagaman pandangan serta mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak yang terlibat.

Penelitian ini secara komprehensif memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian teologi pembebasan Yahudi dalam konteks konflik Israel-Palestina, sekaligus memperluas wawasan akademik dan praktis yang berkaitan dengan dinamika pemikiran keagamaan dan peran

pemuka agama dalam merespons konflik sosial-politik. Manfaat yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga aplikatif, terutama dalam memperkaya dialog antaragama dan mendukung upaya perdamaian yang berlandaskan pada nilai keadilan, etika profetik, serta solidaritas kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi pijakan strategis dalam pengembangan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi konflik yang selama ini kompleks dan berlarut-larut.

Lebih jauh, keberadaan penelitian ini membuka ruang bagi pemangku kepentingan, baik akademisi, tokoh agama, maupun pembuat kebijakan, untuk memahami dan mengintegrasikan keragaman perspektif teologis sebagai modal dasar merancang pendekatan penyelesaian konflik yang lebih efektif dan responsif terhadap realitas sosial. Manfaat yang dihasilkan mempertegas bahwa kajian teologi pembebasan bukan sekadar studi akademik, melainkan instrumen strategis untuk menggerakkan transformasi sosial-politik menuju perdamaian dan keadilan yang autentik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi dan relevansi intervensi teologis dalam merespons tantangan kontemporer konflik Israel-Palestina.

E. Kerangka Berpikir

Teologi Pembebasan Yahudi (*Jewish Liberation Theology*) merupakan korelasi teologi yang muncul pada pertengahan abad ke-20, kesinambungan dari gerakan teologi pembebasan yang digagas oleh Gustavo Gutierrez di Amerika Latin. Teologi ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan kebebasan sebagai nilai-nilai inti dari tradisi Yahudi, terutama dalam konteks penindasan dan ketidakadilan. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, teologi pembebasan Yahudi menawarkan

perspektif kritis terhadap kebijakan dan praktik yang dianggap tidak adil baik terhadap orang Yahudi dan Palestina. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang relevan dengan teologi pembebasan Yahudi dalam kaitannya dengan konflik ini.

Meskipun Teologi Pembebasan Yahudi memiliki semangat yang kongruen dalam hal pembelaan terhadap kaum tertindas, namun secara historis dan teologis ia bukanlah kelanjutan langsung dari Teologi Pembebasan Amerika Latin. Teologi Pembebasan Amerika Latin, yang berkembang pada era 1960-an hingga 1980-an, muncul dalam konteks kekristenan Katolik yang bergumul melawan penindasan struktural di bawah rezim militer dan sistem ekonomi yang eksploitatif. Teolog seperti Gustavo Gutiérrez menyatukan spiritualitas Kristen dengan analisis Marxis untuk menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya urusan eskatologis, tetapi juga perjuangan konkret dalam sejarah untuk membebaskan kaum miskin dan terpinggirkan¹⁹.

Sebaliknya, Teologi Pembebasan Yahudi—terutama sebagaimana dirumuskan oleh Marc H. Ellis—tumbuh dari refleksi atas trauma Shoah, krisis etika pasca-Holocaust, dan dilema moral atas pendirian serta tindakan negara Israel terhadap rakyat Palestina²⁰. Dengan demikian, orientasi dan basis pergumulannya berbeda: teologi Kristen-Amerika Latin berfokus pada pembebasan kelas melalui praxis kolektif, sedangkan teologi Yahudi lebih menekankan pada dimensi historis-etis dari identitas dan tanggung jawab kolektif umat Yahudi.

¹⁹ Gutiérrez, G. (1988). *A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation* (Orbis Books), 22–23.

²⁰ Ellis, M. H. (1987). *Toward a Jewish Theology of Liberation* (Maryknoll: Orbis Books), xv–xvi.

Lebih lanjut, Ellis menekankan bahwa Teologi Pembebasan Yahudi tidak lahir dari alur kontinuitas ideologis dengan gerakan Amerika Latin, melainkan dari "kehancuran etika yang timbul ketika umat Yahudi berpindah dari status sebagai korban menjadi pelaku penindasan"²¹. Dalam perspektif ini, pembebasan tidak diartikan sebagai revolusi politik semata, tetapi sebagai pemulihan integritas moral dalam menghadapi kekuasaan. Ellis menulis bahwa "Zionisme menandai titik balik dari eksil kenabian menjadi eksil dari keadilan,"²² menegaskan bahwa pembebasan sejati bagi Yahudi tidak terletak pada pendirian negara, tetapi pada kesetiaan terhadap warisan kenabian yang membela kaum lemah dan tertindas. Oleh karena itu, Teologi Pembebasan Yahudi lebih bersifat intra-komunal dan profetik, bukan politis dalam makna institusional. Jika Gutiérrez mengupayakan teologi yang "berakar pada pengalaman umat", maka Ellis membangun teologinya atas dasar krisis spiritual komunitas Yahudi yang menurutnya telah "mengkhianati sejarah penderitaannya sendiri" dengan tidak lagi berpihak kepada korban. Dengan perbedaan latar, konteks, dan pendekatannya ini, jelas bahwa Teologi Pembebasan Yahudi bukanlah kelanjutan dari Teologi Pembebasan Amerika Latin, melainkan sebuah respons otonom terhadap situasi unik yang dihadapi komunitas Yahudi kontemporer.

Teologi pembebasan Yahudi didasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia diciptakan dalam citra Tuhan (*Imago Dei*), yang berarti setiap individu memiliki martabat dan nilai yang tak ternilai. Pemikiran ini mengakar dalam teks-teks kitab suci Yahudi, seperti Taurat, yang

²¹ Ellis, M. H. (1987). *Toward a Jewish Theology of Liberation* (Maryknoll: Orbis Books), 5.

²² Ellis, M. H. (2004). *Israel and Palestine: Out of the Ashes* (London: Pluto Press), 39.

menekankan keadilan (*tzedakah*) dan kasih sayang (*chesed*). Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Mikha 6:8: "*Dia telah memberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN daripadamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?*"

Rabbi Lerner menekan hal tersebut dalam bukunya yang memberikan kemuliaan kepada manusia sebagai ciptaan Tuhan.

Every human being is created in the image of God, which means that each person possesses inherent dignity and worth that cannot be diminished. This foundational belief calls us to stand against all forms of oppression and injustice. To honor the Imago Dei is to recognize the sacredness in every individual, regardless of race, religion, or nationality. It demands that we pursue justice not only for ourselves but for all people who suffer under systems of domination. This is the heart of Jewish liberation theology — a commitment to *tikkun olam*, the repair of the world through acts of justice and compassion."²³

Pengalaman Holocaust memberikan konteks historis yang signifikan bagi teologi pembebasan Yahudi. Holocaust tidak hanya merupakan tragedi besar bagi umat Yahudi, tetapi juga menjadi simbol penindasan dan ketidakadilan yang ekstrem bagi kemanusiaan. Teologi pembebasan Yahudi mengambil pelajaran dari Holocaust untuk menekankan pentingnya melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, baik itu terhadap orang Yahudi maupun kelompok lain.

The Holocaust stands as a profound and devastating marker in Jewish history, shaping not only collective memory but theological reflection. It underscores the extremity of injustice and suffering that humanity can inflict upon itself. For Jewish liberation theology, the Holocaust is not merely a historical tragedy but a call to resist oppression wherever it occurs. It challenges believers to

²³ Michael Lerner, *The Left Hand of God: Taking Back Our Country from the Religious Right* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1996), 45.

seek justice with greater urgency and compassion, aware that silence in the face of evil only perpetuates suffering. This historical reality deepens the moral imperative to pursue *tikkun olam*, repairing the world through active resistance to injustice.²⁴

Teologi pembebasan Yahudi menekankan keadilan sosial sebagai prinsip utama dalam mengevaluasi konflik Israel-Palestina. Rabbi Abraham Joshua Heschel, salah satu tokoh penting dalam teologi pembebasan Yahudi, menyatakan: "*Beberapa orang lebih memilih keadilan yang sempurna, tetapi bagi kami, dalam setiap tindakan yang tidak adil ada bahaya menghancurkan seluruh dunia*".²⁵ Pemikiran ini mendorong para teolog Yahudi untuk mengadvokasi hak-hak asasi manusia dan keadilan bagi semua orang yang terlibat dalam konflik ini.

Sebagian teolog pembebasan Yahudi memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel yang dianggap menindas warga Palestina. Mereka menekankan bahwa tindakan seperti pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat, blokade Gaza, dan kebijakan militer yang keras, tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang dianut dalam tradisi Yahudi. Rabbi Brant Rosen, dalam bukunya *Wrestling in the Daylight*, menulis: "*Mengkritik kebijakan Israel bukanlah anti-Semitisme; itu adalah tanggung jawab moral*".²⁶

Teologi pembebasan Yahudi juga mendorong dialog antaragama sebagai sarana untuk mencapai perdamaian. Melalui dialog ini, diharapkan adanya pemahaman yang lebih baik antara Yahudi dan Muslim, serta pengakuan terhadap penderitaan kedua belah pihak. Rabbi Michael Lerner,

²⁴ David Weiss Halivni, *Breaking the Tablets: Jewish Theology after the Holocaust* (Bloomington: Indiana University Press, 1997), 88.

²⁵ Abraham Joshua Heschel, *The Prophets* (New York: Harper & Row, 1962), 237.

²⁶ Brant Rosen, *Wrestling in the Daylight: A Rabbi's Path to Palestinian Solidarity* (CreateSpace Independent Publishing, 2012), 114.

pendiri *Tikkun Magazine*, menyatakan: "*Perdamaian sejati hanya dapat dicapai melalui pengakuan atas kemanusiaan yang sama dan penderitaan yang dialami oleh kedua belah pihak*".²⁷

Teolog pembebasan Yahudi sering terlibat dalam aktivisme dan advokasi untuk hak-hak warga Palestina. Mereka bekerja sama dengan organisasi hak asasi manusia dan kelompok advokasi untuk mempromosikan keadilan dan perdamaian. Rabbi Lynn Gottlieb, salah satu rabbi perempuan pertama dalam sejarah Yahudi, aktif dalam gerakan pembebasan Palestina dan menyatakan: "*Sebagai orang Yahudi, kita harus berdiri bersama mereka yang tertindas, termasuk warga Palestina*"²⁸.

Pendekatan non-kekerasan menjadi salah satu elemen penting dalam teologi pembebasan Yahudi. Mereka mengadopsi prinsip-prinsip non-kekerasan yang diajarkan oleh tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi dan Martin Luther King Jr. Rabbi Arik Ascherman, pemimpin *Rabbis for Human Rights*, berargumen: "*Non kekerasan adalah jalan yang paling sesuai dengan nilai-nilai Yahudi dalam mencari keadilan dan perdamaian*".²⁹

Solidaritas dengan warga Palestina merupakan komponen penting dalam teologi pembebasan Yahudi. Teolog-teolog ini menekankan pentingnya mendengarkan suara-suara Palestina dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang adil. Rabbi Brian Walt, dalam artikelnya di *Jewish Voice for Peace*, menulis: "Kita harus berdiri bersama saudara-saudara kita

²⁷ Michael Lerner, *Healing Israel/Palestine: A Path to Peace and Reconciliation* (San Francisco: Tikkun Books, 2003), 92.

²⁸ Lynn Gottlieb, *She Who Dwells Within: A Feminist Vision of a Renewed Judaism* (New York: Beacon Press, 1995), 145.

²⁹ Arik Ascherman, *The Other Side of the Wall: A Palestinian Christian Narrative of Lament and Hope* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2020), 76.

di Palestina, mendukung hak-hak mereka, dan bekerja untuk perdamaian yang adil".³⁰

Beberapa teolog pembebasan Yahudi memberikan kritik terhadap ideologi Zionisme, terutama dalam bentuknya yang paling eksklusif. Mereka berpendapat bahwa Zionisme tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam tradisi Yahudi. Rabbi David Weiss Halivni, dalam bukunya *Breaking the Tablets*, menulis: "Zionisme harus dievaluasi kembali dalam terang nilai-nilai etis Yahudi yang mengutamakan keadilan dan kemanusiaan".³¹

Teologi pembebasan Yahudi menawarkan visi masa depan yang damai di mana warga Yahudi dan Palestina dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Mereka mendorong upaya-upaya untuk membangun jembatan perdamaian dan memahami satu sama lain. Rabbi Shmuly Yanklowitz menulis: "Perdamaian sejati hanya dapat dicapai melalui komitmen untuk keadilan, kasih sayang, dan pengakuan atas hak-hak semua orang".³²

Dalam sisi intepretasi teologi pembebasan Yahudi yang lain diungkapkan, keadilan tidak dapat dipisahkan dari pengakuan atas hak-hak dasar orang Yahudi, termasuk hak atas tanah air mereka. Tradisi Yahudi memandang bahwa tanah Israel sebagai janji ilahi kepada Abraham dan keturunannya, sebagaimana tercatat dalam *Tanakh* (Kejadian 15:18). Namun, keadilan ini menjadi lebih mendesak pasca-Holocaust, yang

³⁰ Brian Walt, "Why I Support the BDS Movement," *Jewish Voice for Peace*, diakses 21 Mei 2025, <https://www.jewishvoiceforpeace.org/2015/07/why-i-support-the-bds-movement/>.

³¹ David Weiss Halivni, *Breaking the Tablets: Jewish Theology After the Shoah* (New York: Rowman & Littlefield, 2000), 212.

³² Shmuly Yanklowitz, *Jewish Ethics and Social Justice: A Guide for the 21st Century* (New York: Derusha Publishing, 2012), 159.

menjadi puncak dari sejarah panjang penindasan terhadap bangsa Yahudi. Rabbi Abraham Joshua Heschel, salah satu tokoh utama teologi pembebasan Yahudi, melihat pendirian Israel sebagai tindakan moral yang tak terelakkan. Dalam bukunya *Moral Grandeur and Spiritual Audacity*, Heschel menyatakan, “*The existence of Israel is not just a fact of history; it is a testimony to the resilience and dignity of a people who have endured unimaginable suffering.*” Bagi Heschel, keberadaan Israel mencerminkan kemenangan moral atas penindasan dan Holocaust, serta menjadi simbol pembebasan spiritual bangsa Yahudi.

Holocaust menjadi trauma kolektif yang mengubah cara pandang dunia terhadap nasib bangsa Yahudi. Sebagai puncak dari penindasan selama berabad-abad, Holocaust menunjukkan kegagalan dunia internasional dalam melindungi orang Yahudi. Rabbi Irving Greenberg, seorang teolog pembebasan Yahudi kontemporer, menulis bahwa Holocaust mengajarkan pentingnya kedaulatan bagi bangsa Yahudi. Dalam bukunya *The Jewish Way*, Greenberg menyatakan, “*Never again should Jews be dependent on the kindness of others for survival. A sovereign Jewish state ensures that promise*”.³³

Pandangan ini juga dipegang oleh Emil Fackenheim, yang memperkenalkan konsep "614th commandment" setelah Holocaust. Ia berpendapat bahwa mendukung eksistensi Israel adalah kewajiban moral untuk memastikan Holocaust tidak pernah terulang. Dalam bukunya *To Mend the World*, Fackenheim menulis, “*To abandon Israel is to hand Hitler a posthumous victory*”.³⁴

³³ Irving Greenberg, *The Jewish Way: Living the Holidays* (New York: Touchstone, 1988), 45.

³⁴ Emil L. Fackenheim, *To Mend the World: Foundations of Post-Holocaust Jewish Thought* (Bloomington: Indiana University Press, 1994), 84.

Teolog pembebasan Yahudi tidak melihat Zionisme sebagai proyek kolonial, melainkan sebagai gerakan pembebasan nasional. Rabbi David Hartman, seorang filsuf Zionis religius, menegaskan bahwa Zionisme adalah bagian dari pembaruan teologi Yahudi, yang menghubungkan kembali bangsa Yahudi dengan tanah mereka secara teologis dan historis. Dalam bukunya *A Living Covenant*, Hartman menulis, “*The return to Israel is not merely a political act; it is a theological necessity, a reclaiming of our sacred covenant.*”

Rabbi Jonathan Sacks, mantan Ketua Rabbi Inggris, menambahkan bahwa Israel bukan hanya tempat fisik tetapi juga simbol identitas kolektif Yahudi. Dalam bukunya *Future Tense*, ia menyatakan, “*The land of Israel is where Jewish history began, and where, after the greatest tragedy in Jewish history, it began again.*” Bagi Sacks, pendirian Israel adalah pembaruan sejarah Yahudi yang terputus oleh diaspora.

Para teolog pembebasan Yahudi juga menekankan bahwa hak atas tanah air adalah bagian dari keadilan moral universal. Michael Walzer, seorang filsuf politik Yahudi, melihat hak atas tanah air sebagai hak asasi yang diakui secara internasional. Dalam bukunya *Exodus and Revolution*, Walzer menyatakan, “*The right to self-determination is a universal right. For the Jewish people, it finds its expression in Israel.*”

Rabbi Martin Buber, meskipun dikenal sebagai pendukung dialog Yahudi-Arab, menegaskan bahwa Zionisme adalah gerakan pembebasan bagi bangsa Yahudi. Ia menolak tuduhan bahwa Zionisme adalah kolonialisme, dengan menyatakan bahwa “*Zionism is not colonialism; it is the return of an indigenous people to their ancestral homeland.*” (*On Zion*). Dalam pandangan Buber, Zionisme bukan sekadar gerakan politik atau proyek nasionalis, melainkan sarana untuk merealisasikan nilai-nilai

spiritual dan moral yang terkandung dalam tradisi Yahudi. Ia melihat kembalinya bangsa Yahudi ke tanah Israel sebagai kesempatan untuk membangun masyarakat yang adil, berakar pada prinsip-prinsip etika yang diajarkan dalam Torah. Dalam esainya, “The Spirit of Israel,” Buber menulis:

*“The land of Israel is not just a piece of land for the Jews; it is a task. It is the place where we are called to live out the covenant, to create a society that embodies justice and holiness”.*³⁵ Pandangan ini menunjukkan bahwa bagi Buber, Zionisme adalah proyek teologis untuk membangun masyarakat ideal yang menghormati nilai-nilai universal keadilan.

Meskipun mendukung Zionisme, banyak teolog pembebasan Yahudi tetap membuka ruang untuk kompromi. Rabbi Abraham Joshua Heschel, misalnya, mendukung dialog dan perdamaian antara Yahudi dan Arab, dengan keyakinan bahwa keadilan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak pihak lain. Dalam esainya yang terkenal, ia menulis, *“Justice cannot be for one side alone; it must be shared.”*³⁶

Pendirian Israel bukan hanya keputusan politik, tetapi juga tindakan moral yang berakar pada sejarah, tradisi, dan trauma bangsa Yahudi. Rabbi seperti Abraham Joshua Heschel, Emil Fackenheim, Irving Greenberg, Jonathan Sacks, dan David Hartman mendukung pandangan bahwa Israel adalah keharusan teologis dan keadilan moral bagi bangsa Yahudi setelah penindasan panjang. Dalam teologi pembebasan Yahudi, Israel adalah simbol pembebasan, pemulihan martabat, dan pengakuan atas

³⁵ Martin Buber, “The Spirit of Israel,” dalam *Between Man and Man*, terj. R.F.C. Hull (London: Routledge & Kegan Paul, 1947), 89.

³⁶ Abraham Joshua Heschel, *The Insecurity of Freedom: Essays on Human Existence* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1966), 123.

hak asasi bangsa Yahudi untuk menentukan nasib mereka sendiri. Sedangkan pada bagian kutub yang lain, teologi pembebasan Yahudi diinterpretasikan sebagai simbol pembebasan untuk semua bangsa yang bertikai, Israel dan Palestina.

